

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

(TESIS)

Oleh

**ATRIA DEWI
NPM 2021031016**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh

ATRIA DEWI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan *Intellectual Capital* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data berupa Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK dengan menggunakan data tahun 2017-2020. Pemanfaatan teknologi informasi menggunakan metode pemeringkatan data indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan metode *intellectual capital* menggunakan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) yang dikembangkan oleh Pullic (1998).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (*logistic regression*) dengan bantuan pengolahan data software SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 serta pengaruh positif *intellectual capital* (VAIC) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi dengan nilai signifikansi sebesar 0,026.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *value added* bagi penciptaan laporan keuangan berkualitas yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disertai dengan dukungan kebijakan dari pemerintah agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kata Kunci : *Intellectual Capital*, VAIC, Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INTELLECTUAL CAPITAL ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS OF LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA

By

ATRIA DEWI

This study aims to examine the effect of the use of information technology and Intellectual Capital on the Quality of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia.

The data used in this study are secondary data with sampling techniques using the purposive sampling method. Data in the form of an Information and Communication Technology Index sourced from the Central Statistics Agency and the Ministry of Communication and Informatics as well as financial reports of provincial governments in Indonesia that have been audited by the BPK using data for 2017-2020. The use of information technology uses the method of ranking information and communication technology index data. Meanwhile, the intellectual capital method uses the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) developed by Pullic (1998).

The data analysis method in this study uses logistic regression analysis with the help of SPSS version 20 software data processing. The results showed that the use of information technology had a positive effect on the quality of provincial government financial statements with a significance value of 0.008 and a positive influence of intellectual capital (VAIC) on the quality of provincial government financial statements with a significance value of 0.026.

This research is expected to provide information about value added for the creation of quality financial statements that meet Government Accounting Standards (SAP) accompanied by policy support from the government in order to produce quality financial reports.

Keywords : Intellectual Capital, VAIC, Information Technology Quality of Local Government Financial Statements (LKPD), Local Government.

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Oleh

**ATRIA DEWI
2021031016**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER AKUNTANSI

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN *INTELLECTUAL CAPITAL*
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **ATRIA DEWI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2021031016

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.
NIP. 19730923 200501 1 001

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 19761023 200212 1 002

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.



Sekretaris : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



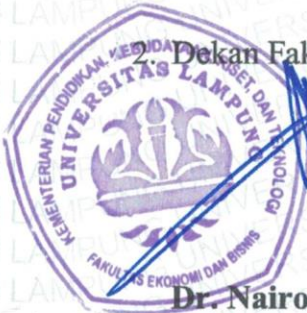
Penguji Utama : Prof. Dr. Einde Evana., S.E., M.Si., Akt.



Anggota Penguji : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.



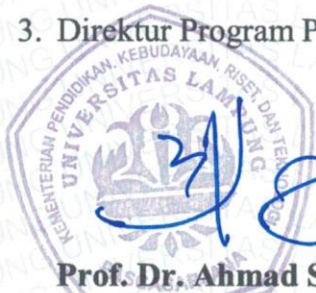
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.,

NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 3 November 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atria Dewi

NPM : 2021031016

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan *Intellectual Capital* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, November 2022
Penulis,



Atria Dewi

NPM. 2021031016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Kerta Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pada 25 Maret 1984 sebagai putri bungsu dari sembilan bersaudara, putri dari pasangan Bapak Drs. H. Halim Basol (alm) dan Ibu Hj. Masitoh yang berprofesi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan seorang Ibu Rumah Tangga.

Saat ini penulis berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Lampung dan telah mempunyai tiga orang anak yang menjadikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan saat ini.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 4 Gedong Air pada tahun 1996. Lalu menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Al-Kautsar pada tahun 1999 dan sekolah menengah atas di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2002. Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu dengan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bandar Lampung pada tahun 2002. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2022.

MOTTO

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR. Muslim)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)

“Tbu adalah sekolah (madrasah) pertama bagi anak-anaknya”

(Syair Arab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini, karya ini

kupersembahkan kepada:

Orang tuaku tercinta,

Drs. H. Halim Basol (Alm) dan Umi Hj. Masitoh

Keluarga besarku tersayang,

Zarkasi Halim, S.E., M.M., Dra. Siti Aisyah, M.Pd., Zainal Abidin, SKM., M.

Luthfie, S.E., Yulia Salma, S.Ag., M.Pd., Laila Hafsoh, S.E.,

Zanariah, A.Mdkeb., Yuhana, S.E.

dan

Orang-orang yang selalu ada dalam setiap doaku yaitu anak-anak solih dan solihaku : Mackanzie Zafir, Fazila Rahmatillah Ayyami dan Lubna Alliya Zalika

serta Ayahnya anak-anakku Syarif Hidayatullah, S.T.

Seluruh Keluarga Besar Sahabat dan Teman-temanku,

serta

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan *Intellectual Capital* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. Einda Evana., S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan tesis ini.
7. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Penguji Kedua atas segala saran, masukan, arahan dan nasihat yang telah diberikan dalam proses penyempurnaan tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Orang tuaku; Umi Hj. Masitoh untuk segala doa, dukungan, kasih sayang, dan perjuangan demi keberhasilanku. Terimakasih untuk doa, kasih sayang, serta motivasinya selama ini.
10. *My support system* ku ketiga anak solih dan soliha : Mackanzie Zafir, Fazila Rahmatillah Ayyami dan Lubna Alliya Zalika. Terimakasih atas doa dan dukungannya untuk bunda dan semoga menjadi motivasi bagi kalian kelak dalam menuntut ilmu serta teruntuk ayahnya anak-anakku Syarif Hidayatullah, S.T. terimakasih atas kebaikannya selama ini.
11. Abang-abang dan kakak-kakakku tersayang : Zarkasi Halim, S.E., M.M., Dra. Siti Aisyah, M.Pd., Zainal Abidin, SKM., M. Luthfie, S.E., Yulia Salma, S.Ag., M.Pd., Laila Hafsoh, S.E., Zanariah, A.Mdkeb. dan Yuhana, S.E. Terimakasih untuk segala *support* dan doa-doanya.
12. Ibu Binarti Bintang, S.Sos., M.IP. selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat daerah Provinsi yang telah memberikan izin untuk melanjutkan study.
13. Bapak Bayu Mahardhika, S.H., M.A.P. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta rekan-rekan kerjaku di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
14. Senior sekaligus mentorku Bapak Andrew Marthin A, LHS, S.E., Ak., M.Si. Terimakasih atas bimbingannya hingga terselesaikannya study ini.

15. Sahabat-sahabatku : Watim Maysaroh, Christine Chinintya, Rizki Triyani Sinaga, Muh. Anur Ridwan, Ina Fitriani, Eka Aprilia dan Bella Chenia Meitasir. Terimakasih untuk semua kebaikan dan kebersamaanya selama masa studi.
16. Sahabatku di dunia dan InshaAllah hingga surga : Widya Ratno Sari, S.IP., MIA dan Siti Juweny, S.E., M.Ak. Terimakasih untuk semua kebaikan dan doanya.
17. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan.
18. Seluruh sahabat seperjuangan Magister Ilmu Akuntansi 2020.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Demikianlah, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis,

Atria Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kontribusi Penelitian	13
1.5 Keterbaharuan Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	16
2.1 Teori Agensi.....	16
2.2 Teori Legitimasi.....	17
2.3 Teknologi Informasi.....	18
2.4 <i>Intellectual Capital</i>	22
2.4.1 Definisi <i>Intellectual Capital</i>	22
2.4.2 Pengukuran <i>Intellectual Capital</i> Pada Sektor Publik.....	28
2.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.6 Kerangka Pemikiran Dan Perumusan Hipotesis	42
2.6.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	42
2.6.2 Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	43
2.7 Kerangka Penelitian	47
2.8 Review Penelitian Terdahulu	48

BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Populasi Dan Sampel	50
3.3 Sumber Data.....	52
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	52
3.4.1 Variabel Dependen.....	52
3.4.2 Variabel Independen	53
3.5 Metode Analisis Data.....	55
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	56
3.5.2 Uji Regresi Logistik.....	56
3.5.3 Model Pengujian Hipotesis.....	59
3.5.4 Uji Hipotesis	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Hasil Penelitian	62
4.1.1 Deskripsi Data	62
4.1.2 Statistik Deskriptif.....	62
4.2 Metode Analisis Regresi Logistik.....	65
4.2.1 Uji Keseluruhan Model Regresi	65
4.2.2 Uji Kelayakan Model Regresi	67
4.2.3 Uji Korelasi.....	67
4.2.4 Koefisien Determinasi	70
4.2.5 Klasifikasi Matriks	70
4.3 Model Regresi Logistik.....	71
4.4 Pengujian Hipotesis	73
4.4.1 Uji Wald (Uji T)	73
4.4.2 Uji Omnibus Test (Uji F).....	75
4.5 Pembahasan.....	76
4.5.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas LKPD	76
4.5.2 Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	86
5.3 Saran	87
5.4 Implikasi	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II	6
Tabel 2. Kategori Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi.....	22
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4. Interpretasi Koefisien Korelasi.....	58
Tabel 5. Prosedur Pemilihan Sampel	62
Tabel 6. Statistik Deskriptif	63
Tabel 7. Pengujian -2 Log Likelihood Step 0	66
Tabel 8. Pengujian -2 Log Likelihood Step 1	66
Tabel 9. Pengujian Hosmer and Lemeshow.....	67
Tabel 10. Pengujian Pearson Correlation.....	68
Tabel 11. Pengujian Nagelkerke R Square	70
Tabel 12. Pengujian Matrik Klasifikasi	71
Tabel 13. Model Regresi Logistik.....	72
Tabel 14. Pengujian Variables In The Equation.....	74
Tabel 15. Pengujian Omnibus Test of Model Coefficient.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Perolehan Opini BPK atas LKPD (2015-2019).....	4
Gambar 2. Kerangka Penelitian	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan alat utama bagi pemerintah daerah dalam mencatat dan melaporkan informasi kegiatan pemerintah sebagai bentuk pelaporan internal maupun eksternal yang merupakan wujud dari akuntabilitas pemerintah. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut agar dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Dampak dari implementasi *New Public Management* (NPM) di Indonesia terhadap manajemen sektor publik adalah lahirnya reformasi birokrasi di berbagai sektor baik itu di bidang politik, hukum, ekonomi dan birokrasi. Pemerintah selaku shareholder diharapkan dapat memenuhi tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan karakteristik *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability* (UNDP, 1997). Untuk mewujudkan *Good Government Governance*, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal pokok yang harus terpenuhi (Mardiasmo, 2006)

dan merupakan tujuan dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik (Maydiyanti, 2020).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Herindraningrum, 2021).

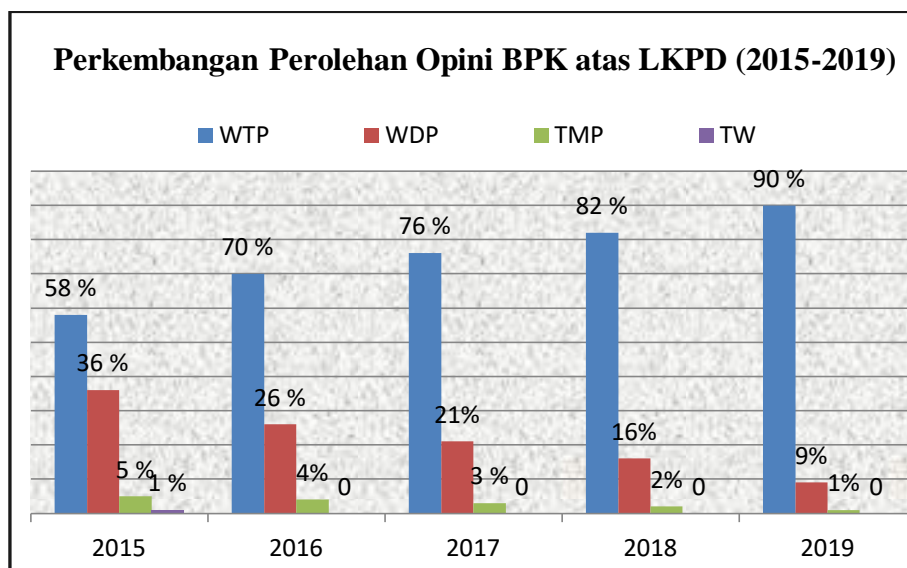
Laporan keuangan harus dapat menjelaskan kepada media tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila neraca dan laporan keuangan sudah disajikan dengan baik karena informasi laporan keuangan didalamnya tentang pengelolaan sumber daya akan menciptakan iklim usaha atau investasi yang positif seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik dan internasional kepada pemerintah Indonesia termasuk para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Indrawati, 2017).

Di Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dapat tercermin dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa penilaian terhadap akuntabilitas keuangan negara dilakukan oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK RI) melalui opini audit yang diberikan. Opini audit merupakan indikator kualitas akuntabilitas keuangan yang terlihat pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Paragraf 14 menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adanya pengaruh positif signifikan terhadap opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota diungkapkan pada penelitian Masdiantini dkk (2016).

Opini WTP oleh BPK terhadap pemerintah daerah mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020, diketahui bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan, dari semula hanya 58% pada tahun 2015 menjadi 90% pada tahun 2019. Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019, mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 LKPD (1%). Perkembangan opini BPK dalam 5 tahun terakhir atas LKPD terlihat pada gambar 1.



Sumber : IHPS BPK-RI Semester II tahun 2020

Gambar 1. Perkembangan Perolehan Opini BPK atas LKPD (2015-2019)

Gambar 1 memperlihatkan adanya kenaikan atau penurunan opini BPK dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kenaikan opini pada LKPD tahun 2019 terjadi pada pemerintah provinsi (pemprov) dari 32 (94%) menjadi 34 (100%) LKPD. Kenaikan opini juga terjadi pada pemerintah kabupaten (pemkab) dari 327 (79%) menjadi 364 (88%) LKPD serta pada pemerintah kota (pemkot) dari 84 (90%) menjadi 87 (94%) LKPD. Hal ini berarti opini WTP telah dicapai oleh pemerintah provinsi di Indonesia 34 (100%), pemerintah kabupaten 364 dari 415 (88%), dan pemerintah kota 87 dari 93 (94%). Selain itu terdapat kenaikan dari opini TMP menjadi opini WDP pada 8 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP pada 45 LKPD. Kenaikan terjadi karena pemerintah daerah telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, penurunan terjadi diakibatkan banyaknya

temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas akun-akun yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kurangnya respon pemerintah daerah dalam tindak lanjut temuan.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah meskipun terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemerintah daerah akan tetapi kasus korupsi juga terus meningkat. Seharusnya jika sudah WTP maka makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah terbangun sistem pengendalian internal yang baik (Indrawati, 2019). Faktanya, saat ini banyak kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini terlihat pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut riset Transparency International Indonesia (TII) dimana pada tahun 2021 IPK masih tergolong tinggi. Peringkat Indonesia berada pada posisi 96 dari 180 negara. Posisi tersebut masih berada di bawah sejumlah negara ASEAN lainnya. Korupsi menyebabkan terhambatnya pertumbuhan investasi yang berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Korupsi juga bisa memicu munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah (The World Bank, 2018).

Penelitian Indriasari (2008) menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ternyata dalam laporan keuangan yang diaudit masih banyak terlihat catatan tentang kesalahan penyajian atau pelaporan dengan data yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan hal ini selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan. Temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan

Hasil Pemeriksaan pemerintah daerah, menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II

Permasalahan	2015	2016	2017	2018	2019
Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	1.608	860	625	511	514
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	5.128	4.814	1.273	1.197	1.078
Temuan ketidakhematan	-	-	2.336	2.159	2.405
Jumlah Temuan	6.736	5.674	4.234	3.867	3.997

Sumber : IHPS BPK-RI Semester II tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

Kondisi tersebut tidak seiring dengan peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana seharusnya dengan diperolehnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah memenuhi karakteristik andal yang berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memenuhi syarat laporan keuangan yang berkualitas sehingga informasi yang diberikan tepat dan bermanfaat, laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya berupa pemanfaatan teknologi informasi serta kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Revolusi industry 4,0 berdampak juga terhadap pemanfaatan teknologi pada sistem pemerintahan. Dalam perkembangannya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemrosesan data mengalami perubahan dari sistem manual digantikan dengan sistem komputer sebagai alat pemrosesan data. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000).

Penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi pada sektor publik di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat terbatas (Dewi *et al.*, 2021). Sedangkan dengan adanya reformasi mendorong sektor publik untuk lebih meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong transformasi organisasi sektor publik (Cordella, 2006) sebagai upaya perbaikan layanan publik dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat (Knox, 2019).

Pemantauan berkelanjutan terhadap fenomena perkembangan Teknologi Informasi sangat penting bagi para pengambil kebijakan terutama untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan yang akan diambil harus berdasarkan pada bukti dan fakta yang terukur serta indikator yang dapat diperbandingkan. Perkembangan pemanfaatan teknologi pada suatu wilayah dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu indikator untuk memantau perkembangan suatu negara atau wilayah menuju masyarakat informasi yang mencerminkan pembangunan TIK di Indonesia dan 34

provinsi di Indonesia selama setahun. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik dan kementerian Komunikasi dan Informatika.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) ini dikembangkan oleh *International Telecommunication Union (ITU)* dengan nama *Information Communication Technology (ICT) Development Index*. IP-TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu IP-TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antar wilayah dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Jumlah temuan dan rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih banyak ditemukan juga mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan yang diharapkan. Sumber Daya Manusia sebagai pengelolaan keuangan dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi.

Kondisi yang juga banyak terjadi di pemerintah daerah saat ini adalah banyaknya pengelola keuangan yang tidak memenuhi kompetensi. Pendelegasian tugas masih berdasarkan pengalaman ataupun *skill* yang dimiliki. Nazier (2009) menyatakan bahwa masih banyak tenaga akuntansi di sektor pemerintahan baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana kebijakan yang belum memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Akibatnya, Sumber Daya Manusia akan cenderung sulit berkreasi membuat ide maupun gagasan yang baru dalam mengelola keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan serta ketidakmampuan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dilapangan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan pada semester I tahun 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Indonesia menyebutkan bahwa masih banyaknya pemerintah daerah yang melakukan kesalahan dalam pencatatan dan penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga penyajiannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta tidak didukung oleh bukti yang kuat. Temuan lainnya juga mengungkapkan bahwa piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan pencatatan persediaan yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang bersangkutan serta masih banyak temuan lainnya. Selain itu temuan BPK mengungkapkan juga kelemahan dalam system pengendalian akuntansi dan pelaporan.

Dari berbagai kondisi tersebut, menggambarkan bahwa faktor manusia (*human resource*) yang merupakan bagian dari aset tidak berwujud (*intellectual*

capital) berperan penting untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas karena *intellectual capital* mewakili sumber daya yang bernilai dan kemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan. Modal intelektual dalam akuntansi sangat penting untuk dikelola dengan baik agar dapat memperbaiki kekurangan dalam kualitas laporan keuangan (*Alimuddin et al.*, 2017).

Pengelolaan aset tidak berwujud dalam organisasi sektor publik memperoleh perhatian tersendiri karena sebagian besar sasaran strategik maupun output bersifat tidak berwujud (*intangible*) dan merupakan faktor kunci untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berbeda dengan organisasi sektor swasta yang berfokus pada penciptaan nilai moneter. Pengungkapan informasi modal intelektual secara *voluntary* di dalam laporan tahunan perusahaan akan memperkuat pengaruh modal intelektual terhadap nilai pasar perusahaan (*Suhendro et al.*, 2021). Hal ini dikarenakan perusahaan akan direspon oleh investor dengan penilaian yang lebih tinggi sebagai wujud dari ekpektasi atau harapan investor terhadap kinerja perusahaan yang akan datang.

Pada organisasi sektor publik manfaat yang diberikan kepada masyarakat kebanyakan dibangun oleh aset tidak berwujudnya (*Del Bello*, 2006). Aset tidak berwujud akan menjadi penanaman modal yang bisa menciptakan nilai dan keuntungan organisasi (*Hashim et al.*, 2015) serta akan meningkatkan kesejahteraan publik, kualitas hidup maupun perlindungan bagi lingkungan dan reputasi suatu wilayah oleh pemerintah dimana semua produk akhirnya adalah administrasi layanan yang pada dasarnya tidak berwujud (*Serrano et al.*, 2003).

Penelitian Haliah and Nirwana (2019) menyatakan bahwa upaya peningkatan kinerja pemerintah adalah melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan dimana kompetensi merupakan salah satu variabel yang bisa meningkatkan kinerja secara optimal melalui peningkatan laporan keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki modal intelektual yang lebih tinggi mempunyai kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang memiliki modal intelektual yang lebih rendah (Cohen and Vlismas, 2013). Penerapan modal intelektual merupakan bentuk implikasi dari budaya organisasi yang diharapkan dapat menopang dan menciptakan nilai bagi organisasi baik pada aspek manusia, struktur maupun hubungan (Alimuddin *et al.*, 2017).

Intellectual capital mulai dikenal di Indonesia ketika munculnya PSAK No.19 tentang aset tak berwujud (*intangible asset*) yang diartikan sebagai aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik (PSAK No. 19, revisi tahun 2014). *Intellectual capital* tidak hanya berupa *goodwill* ataupun paten seperti yang sering dilaporkan dalam neraca. Kompetensi karyawan, hubungan relasi, penciptaan inovasi dan administrasi hingga kemampuan atas penguasaan teknologi juga merupakan bagian dari *intellectual capital*.

Intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu: 1) Modal Manusia (*Human Resource*) 2) Modal Organisasi (*Structural Resource*) 3) Modal Relasi (*Relational Resource*). Metode pengukuran menggunakan metode *Value Added Intellectual Coeficient* (VAIC) yang dikembangkan oleh Pulic (1998) Ketiga Faktor *intellectual capital* tersebut

diharapkan dapat mendukung upaya pemanfaatan teknologi informasi yang ada sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian-penelitian sebelumnya oleh Kusnadi *et al.*, 2022; Kusumawardhani and Muanas, 2020; Aulia *et al.*, 2019; Nabila *et al.*, 2019; Armel, 2017; Efendi, 2017; Sudarningsih, 2018; Megasiwi, 2020; Azlan *et al.*, 2015 dan Haza, 2015 menyatakan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putra *et al.*, 2021 yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian oleh Nilamsari *et al.*, 2021; Wardani, 2017 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan daerah.

Dari berbagai penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan *intellectual capital* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hampir semuanya menggunakan data primer. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian yang berupa data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi serta Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan *intellectual capital* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat :

1. Menganalisa secara empiris tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Menganalisa secara empiris tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ilmiah terutama dibidang akuntansi sektor publik, yaitu :

Pengembangan model penelitian, yaitu penambahan *intellectual capital* sebagai variabel independen peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi kepada pengambil kebijakan akuntansi sektor pemerintahan dalam menilai kinerja pemerintah

melalui kualitas laporan keuangan untuk selanjutnya agar dapat mempertimbangkan asset tidak berwujud (*intangible assets*) berupa *intellectual capital* sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam memperoleh bukti adanya pengaruh *intellectual capital* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi pihak lain

Beberapa penelitian sebelumnya untuk variabel *intellectual capital* lebih banyak dilakukan di sektor swasta atau sektor profit. Sedangkan pada penelitian ini akan dikembangkan pada objek pemerintah daerah (pemerintah daerah provinsi di Indonesia). Oleh karenanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian-penelitian tentang *intellectual capital* yang telah ada dan dapat dijadikan literatur untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Keterbaharuan Penelitian

Berdasarkan kontribusi penelitian diatas, yang menjadi keterbaharuan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian sebelumnya untuk variabel *intellectual capital* lebih banyak dilakukan di sektor swasta sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan pada objek Pemerintah Daerah di Indonesia.
- b. Pengembangan model penelitian ini yaitu pengukuran variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan *intellectual capital* menggunakan data sekunder

yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi di Indonesia serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Sedangkan mayoritas penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan data primer untuk menguji penelitiannya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Jensen and Meckling (1976) dalam teori agensi menyatakan bahwa asimetri informasi merupakan permasalahan utama dalam hubungan keagenan (*principal-agency relationship problem*) yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan akibat masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Masalah keagenan muncul ketika principal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Zimmerman, 1986). Konflik kepentingan pada pemerintahan terjadi diantara pejabat pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban (*accountability*) atas segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009).

Pengungkapan informasi keuangan publik internet juga dapat digambarkan dengan teori keagenan (Styles *et al.*, 2007). Asimetri informasi dapat diminimumkan dengan menggunakan informasi akuntansi yang berkualitas berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara (Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004). Bagi pengguna, laporan keuangan digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah sebagai penerima amanah.

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Deegan (2004) dalam perspektif teori legitimasi bahwa suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Teori ini juga menganggap organisasi menjadi bagian dari sistem sosial lebih luas yang memandang masyarakat sebagai keseluruhan. Organisasi menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggung jawab kepada pemilik.

Dalam sektor publik, unit pemerintahan merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004). Pelaporan keuangan sektor publik bertujuan untuk menyampaikan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah agar tersedianya informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Teori legitimasi sangat erat berhubungan dengan pelaporan *intellectual capital*. Menurut pandangan teori legitimasi, perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan kapasitas *intellectual capital* dalam laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari publik atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pengakuan legitimasi publik ini menjadi penting untuk mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan sosial perusahaan. Teori legitimasi juga digunakan sebagai pembenaran mengapa pemerintah harus mengungkapkan informasi keuangan kepada publik melalui situs resmi masing-masing pemerintah provinsi.

2.3 Teknologi Informasi

A. Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem Informasi (SI) merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon, Kenneth C and Laudon, 2000).

Definisi teknologi sistem informasi (TSI) menurut Wilkinson *et al.* (2000) merupakan alat yang terdiri dari seperangkat komponen yang terkait dengan informasi dalam rangka mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Kombinasi teknologi komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi serta untuk penyaluran informasi menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi yang digunakan meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan

jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Sedangkan menurut McKeown (2001), teknologi informasi mengacu pada semua bentuk teknologi yang digunakan untuk bisa menciptakan, menyimpan, mengubah dan juga menggunakan informasi tersebut dalam semua bentuknya.

Teknologi berfungsi meningkatkan layanan pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan untuk memberikan informasi anggaran, pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya dan mempermudah terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengendalian anggaran sektor publik dalam system desentralisasi pemerintah (Yapa and Guah, 2012).

Definisi Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson *et al.* (1991) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi pada organisasi akan menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan menjadikan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut Hamzah (2009), pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Pemerintah daerah di Indonesia bisa dikatakan hampir semuanya telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Berbagai aplikasi digunakan diantaranya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) maupun system lainnya baik yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun aplikasi yang diciptakan sendiri oleh daerah. Daerah diberikan kewenangan menggunakan aplikasi apapun agar dapat mendukung proses penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas untuk kemudian dilakukan audit oleh BPK RI.

B. Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan (Thompson *et al.*, 1991). Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini melihat pemanfaatan teknologi informasi disuatu daerah pada Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *Information Communication Technology (ICT) Development Index*. IP-TIK merupakan suatu indikator untuk memantau perkembangan suatu negara atau wilayah menuju masyarakat informasi. Publikasi IP-TIK mencerminkan pembangunan TIK di Indonesia tingkat nasional dan 34 provinsi di Indonesia selama setahun. Data yang digunakan dalam IP-TIK bersumber dari data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data yang

dipublikasikan dapat diperbandingkan antar waktu dan antar wilayah. Data dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital serta potensi pengembangan TIK.

IP-TIK disusun oleh sebelas indikator yang dikombinasikan menjadi suatu ukuran standar pembangunan TIK suatu wilayah dan dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ke-sebelas sektor tersebut dibagi lagi oleh 3 sub-indeks yaitu:

- a) Sub-indeks Akses dan Infrastruktur, menggambarkan kesiapan TIK (*ICT readiness*) yang diukur dari sisi akses dan infrastruktur TIK dengan lima indikator penyusun subindeks :
 1. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 2. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 3. Bandwidth internet internasional per pengguna
 4. Presentase rumah tangga yang menguasai komputer
 5. Presentase rumah tangga yang memiliki akses internet
- b) Sub-indeks Penggunaan, menggambarkan intensitas TIK (*ICT intensity*) yang diukur dari penggunaan TIK dengan tiga indikator penyusun subindeks
 1. Presentase penduduk yang mengakses internet
 2. Pelanggan internet broadband tetap kabel per 100 penduduk
 3. Pelanggan internet broadband tanpa kabel per 100 penduduk
- c) Sub-indeks Keahlian
 1. Angka melek huruf

2. Angka partisipasi kasar sekunder (SMP dan SMA / sederajat)
3. Angka partisipasi kasar tersier (pendidikan tinggi D1- S1)

Dengan melihat nilai indeks, bukan hanya melihat tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara namun juga dapat melihat kesenjangan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi antar negara. Nilai indeks berada di interval 1-10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu negara lebih optimum. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di wilayah atau negara tersebut belum optimal. Kategori IP-TIK dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Kategori Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi

Kategori	IP-TIK
Tinggi	7,26 – 10,00
Sedang	5,01 – 7,25
Rendah	2,51 – 5,00
Sangat Rendah	0,00 – 2,50

Sumber : Publikasi IP-TIK 2019

2.4 *Intellectual Capital*

2.4.1 Definisi Intellectual Capital

Review literatur yang dilakukan Kaufmann (2002) tentang *intellectual capital* menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan mengenai istilah atau definisi *intellectual capital*. Bounfour and Valle (2005) menyatakan bahwa para peneliti dan analis belum memperoleh kesepakatan mengenai definisi dari investasi tidak berwujud beserta elemen pembentuknya.

Beberapa definisi *intellectual capital* menurut para ahli yang dirangkum oleh Schneider (2008) diantaranya adalah : Stewart (1997) yang menyatakan bahwa *intellectual capital* didefinisikan sebagai materi intelektual-pengetahuan, informasi, *intellectual property*, dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan. Mengacu pada penelitian Stewart (1997) maka penelitian Bontis (1997) mengklasifikasikan *intellectual capital* menjadi modal manusia, modal struktural dan modal pelanggan dimana ketiga komponen tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sveiby (1997) menyebutkan bahwa *intellectual capital* meliputi *invisible asset* organisasi yang terdiri dari: kompetensi pegawai (skill, pendidikan, dan pengalaman) dan kapasitasnya untuk bertindak dalam berbagai situasi; struktur internal (manajemen, struktur paten, konsep, model, kapabilitas penelitian serta pengembangan dan software) dan struktur eksternal (nama baik, merk, hubungan dengan pelanggan dan pemasok). Brooking (1997) menyatakan bahwa *intellectual capital* terdiri dari manusia, sistem, dan komponen pasar; Roos and Dragonetti (1998) mengklasifikasikan *intellectual capital* sebagai *structural capital* dan *human capital, thinking* dan *non-thinking assets*.

Dari beberapa definisi tentang *intellectual capital* tersebut, sebagian besar peneliti mengidentifikasi komponen *intellectual capital* menjadi tiga bagian yang meliputi *human capital, structural (organizational) capital* dan *customer (relational) capital* (Ulum, 2009). Ketiga dimensi *intellectual capital* tersebut saling mempengaruhi. Modal manusia merupakan masukan bagi modal organisasi dan modal sosial. Modal organisasi merupakan masukan bagi modal

sosial. Terakhir, interaksi *intellectual capital* dengan lingkungan melalui modal sosial. Hal ini dapat juga dianalogikan dengan sederhana seperti seorang karyawan yang memiliki modal intelektual (modal manusia) yang tidak akan berguna tanpa struktur organisasi yang mendukung (modal struktural) yang dapat memanfaatkan dan memelihara keterampilannya .

2.1.1.1 Human Capital

Human capital merupakan *life blood* dalam *intellectual capital*. Disinilah sumber *innovation* dan *improvement*, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. *Human capital* juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Human capital* mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. *Human Capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dalam modal ini, yaitu *training programs, credential, experience, competence, recruitment, mentoring, learning programs, individual potential and personality*.

Human capital memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda dari jenis modal lainnya. Menurut Mayo (2000), definisi *human capital* merupakan kapabilitas, pengetahuan, skill, pengalaman, dan jaringan dengan kemampuan untuk mencapai hasil dan potensi untuk tumbuh; motivasi individual dalam bentuk aspirasi, ambisi, mengarahkan, motivasi kerja dan produktivitas; keefektifan kelompok kerja dalam bentuk dukungan, saling menghormati untuk

berbagi dan nilai-nilai; kepemimpinan dalam bentuk kejelasan visi dan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi; iklim organisasional dalam bentuk budaya, khususnya kebebasan untuk berinovasi, keterbukaan, fleksibilitas dan rasa hormat untuk tiap individu.

Inti dari modal manusia adalah kecerdasan dari anggota organisasi. Modal manusia mengacu pada pengetahuan, kemampuan dan perilaku faktor manusia (Cabrita dan Bontis, 2008). Meskipun sulit diukur namun faktor produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan melalui peningkatan kualitas penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini dapat ditambah dengan investasi yang tepat terhadap sumber daya manusianya. Faktor Sumber Daya Manusia (*human capital*) merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pegawai (Michael, Chidiebere and Ekwe, 2013).

Saat ini profesionalisme Aparatur Sipil Negara terus menjadi perhatian. Salah satunya terlihat dengan adanya intruksi Badan Kepegawaian Negara yang mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang dikenal dengan sebutan IP-ASN melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. IP-ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai. IP-ASN ditujukan kepada instansi pemerintah untuk mengukur, menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN baik pusat maupun daerah serta sebagai bahan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada presiden terkait profesionalitas ASN dalam bekerja. Proses penataan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan keahlian melalui jabatan,

kelas jabatan juga saat ini menjadi topik utama dalam dunia pemerintahan saat ini dan berbagai regulasi yang mengatur hal tersebut juga terus dibenahi. Hal terus merupakan upaya pemerintah agar ASN dapat terus meningkatkan keahlian, pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat lebih meningkatkan kontribusinya terhadap negara.

Modal *human capital* pada penelitian ini direpresentasikan dengan *Value Added Human Capital* (VAHU) pada metode pengukuran yang dikembangkan oleh Pulic (1998)

2.1.1.2 Structural Capital atau Organizational Capital

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas organisasi dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki.

Modal organisasi mencakup pengetahuan yang dimasukkan kedalam infrastruktur teknologi dan kemampuan organisasi untuk memperbaikinya (Cohen and Vlismas, 2013). Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka *intellectual capital* tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Modal *structural capital* atau *organizational capital* pada penelitian ini direpresentasikan dengan *Structural Capital Value Added (STVA)* pada metode pengukuran yang dikembangkan oleh Pulic (1998).

2.1.1.3 Relational Capital atau Customer Capital

Relational Capital merupakan komponen *intellectual capital* yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan organisasi untuk mengelola hubungannya dengan mitra sosial eksternal untuk menciptakan nilai ekonomi (Cohen and Vlismas, 2013).

Modal relasional pada pemerintahan diartikan dalam bentuk kerjasama. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/ atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah menjelaskan bahwa bentuk kerjasama daerah terdiri atas: 1) Kerjasama daerah dengan daerah lain (KSDD) 2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK) 3) Kerjasama daerah dengan pemerintah daerah luar negeri (KSDPL) 4) Kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri (KSDLL).

Modal *relational capital* atau *customer capital* pada penelitian ini direpresentasikan dengan *Value Added Capital Employed (VACA)* pada metode pengukuran yang dikembangkan oleh Pulic (1998).

2.4.2 Pengukuran *Intellectual Capital* pada Sektor Publik

Modal intelektual merupakan sumber daya penting bagi pembangunan. Dengan menempatkan pengetahuan sebagai visi pembangunan ekonomi akan menjadikan modal kompetitif bagi kinerja pemerintah. Ada banyak artikel yang menyelidiki hubungan antara *intellectual capital* dan kinerja di Indonesia. Namun sebagian besar berfokus pada sektor swasta. Pada penelitian ini, modal intelektual akan dilihat pada pemerintah daerah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan sektor publik saat ini tidak memungkinkan untuk melaporkan *intellectual capital* dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan diantaranya kriteria pengukuran akuntansi tradisional pada umumnya didasarkan pada nilai moneter terhadap transaksi yang sudah terjadi di masa lalu (*backward looking information*). Padahal agar dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan, informasi akuntansi juga harus bisa memprediksi masa depan (*backward looking information*).

Intellectual capital yang merupakan *intangibilitas* pada sektor publik terkait pada tujuan, proses produksi dan output. Mengingat pentingnya *intellectual capital* bagi sektor publik, maka *intellectual capital* perlu disajikan dalam laporan *intellectual capital* tersendiri (bersifat *voluntary*), terpisah dari laporan keuangan tradisional yang bersifat *mandatory* untuk memenuhi kebutuhan stakeholder utama (internal manajemen) terhadap akuntabilitas, manajemen, transparansi dan evaluasi kinerja sektor publik. Hal ini sesuai dengan *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 8 yang menyatakan bahwa laporan akuntansi

bertujuan umum tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi yang diperlukan oleh *stakeholder*. Oleh karenanya *stakeholder* dapat menggunakan informasi dari sumber lainnya.

Metode pengukuran dan pelaporan *intellectual capital* pada penelitian ini menggunakan metode *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM). Metode VAICTM merupakan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Pulic (1998) yang didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari asset berwujud (*tangible asset*) dan asset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki oleh perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA). *Value added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penetapan nilai (*value creation*) (Pulic, 1998). *Value added* dihitung sebagai selisih antara *output* dan *input* (Pulic, 1999).

Tan *et al.* (2007) menyatakan bahwa output (OUT) merepresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh *revenue*. Menurut Tan *et al.* (2007), hal penting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*) tidak termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya dalam proses *value creation*, *intellectual potential* (yang direpresentasikan dengan *labour expenses*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen IN (Pulic, 1999). Aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (*value creating entity*) (Tan *et al.*, 2007).

Proses *value creation* dipengaruhi oleh efisiensi dari *Human Capital* (HC) *Capital Employed* (CE) dan *Structural Capital* (SC).

2.4.2.1 Value Added Human Capital (VAHU)

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dengan HC mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. Perusahaan tidak dapat menciptakan pengetahuan dengan sendirinya tanpa inisiatif dari individu yang terlibat dalam proses organisasi. *Human capital* menjadi sangat penting karena merupakan aset perusahaan dan sumber inovasi serta pembaharuan. Karyawan dengan *human capital* yang tinggi akan lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang berkualitas sehingga dapat mempertahankan maupun menarik pelanggan baru. Pengukuran VAHU dilakukan dengan cara membandingkan *value added* dengan human capital (HC) dengan *value added* (VA) diperoleh dari selisih antar total penjualan dan pendapat lain (OUT) dengan beban dan biaya-biaya selain beban karyawan (IN). Sedangkan *human capital* (HC) diambil dari beban yang dikeluarkan dalam meningkatkan kemampuan karyawan.

Dapat disimpulkan bahwa *Value Added Human Capital* adalah kemampuan karyawan perusahaan dalam meningkatkan *Value Added* dari setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan tersebut (Aprianti, 2018).

2.4.2.2 *Structural Capital Value Added (STVA)*

Structural Capital Value Added (STVA) merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufaktur, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan (Sawarjuwono, 2014). Perusahaan dengan *structural capital* yang kuat akan memiliki dukungan budaya yang memungkinkan perusahaan untuk mencoba sesuatu, untuk belajar dan untuk mencoba kembali sesuatu. Konsep *intellectual capital* memungkinkan *intellectual capital* untuk diukur dan dikembangkan dalam suatu perusahaan (Ulum, 2009). Pengukuran STVA dilakukan dengan cara membandingkan *structural capital (SC)* terhadap *value added (VA)*, dengan *value added* diperoleh dari selisih antara total penjualan dan pendapatan lain (OUT) dengan beban dan biaya-biaya selain beban karyawan (IN). Sedangkan *structural capital (SC)* diambil dari selisih *value added (VA)* dengan beban yang dikeluarkan dalam meningkatkan kemampuan karyawan (HC).

Dapat disimpulkan bahwa *structural capital value added (STVA)* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan struktural perusahaan yang dapat digunakan perusahaan dalam menciptakan *value added* (Aprianti, 2018).

2.4.2.3 *Value added of Capital Employed (VACA)*

Value added of Capital Employed (VACA) adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. Ulum (2009) mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE (*Capital Employed*) menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, pemanfaatan *intellectual capital* yang lebih baik merupakan bagian dari *intellectual capital* perusahaan. Pengukuran VACA dilakukan dengan cara membandingkan Value Added dengan *capital employed (CE)*, dengan *value added (VA)* diperoleh dari selisih antara total penjualan dan pendapatan lain (OUT) dengan beban dan biaya-biaya. *Value added* merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (Ulum, 2009).

Dapat disimpulkan bahwa *Value Added Capital Employed* adalah indikator dari *Value Added* yang diciptakan oleh satu unit *physical capital* yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola *capital asset* yang dimiliki (Aprianti, 2018).

Intellectual capital berkorelasi positif dengan kinerja pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah yang memiliki *intellectual capital* yang tinggi akan berkinerja lebih baik daripada pemerintah daerah dengan *intellectual capital* yang rendah (Cohen and Vlismas, 2013). Kinerja yang dirasakan dianalisis dalam hal biaya, kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Keterkaitan antara kinerja dengan kualitas laporan keuangan adalah dengan kualitas laporan keuangan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah (Haliah and Nirwana, 2019) dimana kompetensi merupakan salah satu variabel yang bisa meningkatkan kinerja secara optimal melalui peningkatan laporan keuangan.

Untuk dapat dilakukan pemeringkatan terhadap sejumlah perbankan, hasil perhitungan VAIC dapat diranking berdasarkan skor yang dimiliki. Sejauh ini, belum ada standar tentang skor kinerja IC tersebut, namun penelitian Ulum (2008) telah merumuskan untuk memberikan kategori dari hasil perhitungan VAIC, yaitu:

1. *Top performers* – skor VAIC di atas 3,00
2. *Good performers* – skor VAIC antara 2,0 sampai 2,99
3. *Common performers* – skor VAIC antara 1,5 sampai 1,99
4. *Bad performers* – skor VAIC di bawah 1,5

2.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku pemerintah yang bersangkutan. Mardiasmo (2002) menerangkan bahwa laporan keuangan sektor publik dibuat dengan beberapa alasan yaitu :

- a. Dari sisi internal bahwa laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

- b. Dari sisi eksternal bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang membuat informasi pada laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Menurut standar akuntansi pemerintahan, determinan fundamental kualitas laporan keuangan entitas pemerintah adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP 71/2010). Relevan artinya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan karena: (1) memiliki kemampuan untuk membuat prediksi atau membentuk ekspektasi tentang masa depan (*predictive value*), (2) memiliki (*feedback value*), (3) disajikan sebelum kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan (*time lines*), dan (4) mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi keputusan (*faithful representation*). Andal artinya dapat dipercaya untuk dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan, karena informasinya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan hal yang seharusnya, dapat diuji kebenarannya serta disajikan secara netral untuk memenuhi kebutuhan umum pengguna laporan keuangan. Dapat dibandingkan artinya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada periode yang sama, karena disajikan berdasarkan prinsip dan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten serta apabila terjadi perubahan prinsip dan kebijakan akuntansi maka dibuat pengungkapan. Dapat dipahami artinya mudah dipahami oleh pengguna laporan

keuangan, karena informasinya disajikan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah (terminologi) yang baku dan berterima umum sesuai dengan standar akuntansi.

Dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan opini auditor independen yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Argumentasinya, opini BPK mempresentasikan kesesuaian laporan keuangan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Semakin kecil kesalahan penyajian dan ketidaksesuaian dengan SAP maka dapat diartikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk opini audit pemerintah daerah. Opini audit merupakan indikator kualitas akuntabilitas keuangan yang terlihat pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara. Pemeriksaan tersebut terdiri atas: 1) Pemeriksaan keuangan 2) Pemeriksaan kinerja dan 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ruang lingkup audit meliputi aspek-aspek berikut :

1. Audit Finansial.

Audit financial merupakan jenis audit yang lebih berorientasi pada masalah keuangan. Sasaran audit keuangan adalah kewajaran atas laporan keuangan yang telah disajikan manajemen. Pada saat ini orientasi internal auditor tidak hanya pada masalah audit keuangan di organisasi. Hal ini disebabkan audit atas laporan keuangan telah dilakukan oleh eksternal auditor pada waktu audit umum (general audit). General audit ini bisa dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Audit Operasional

Istilah lain dari audit operasional adalah audit manajemen atau audit kinerja. Sasaran dari audit operasional adalah penilaian masalah efisiensi, efektifitas dan ekonomis. Audit operasional ini memiliki peran penting bagi organisasi, karena mampu memberikan informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

3. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan adalah suatu audit yang bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan/kegiatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Audit kecurangan

Adalah audit yang ditunjukkan untuk mengungkapkan adanya kasus yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan organisasi dan Negara yang menguntungkan pribadi dan kelompok.

Ruang lingkup pemeriksaan BPK RI sesuai dengan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara pasal 4, dinyatakan terdiri atas pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI didasarkan pada standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Pada tingkat perwakilan, Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan di tingkat daerah antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta Badan Usaha Milik Daerah.

Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, opini BPK dibedakan menjadi lima yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf penjelas (WTP DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan yang memperoleh opini WTP merepresentasikan laporan keuangan paling berkualitas, berturut-turut diikuti dengan opini WTP-DPP, Opini WDP, opini TW dan TMP. Untuk itu dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan skala

ordinal berdasarkan kualitas opini BPK yaitu opini WTP = 1 dan opini diluar WTP = 0.

Unsur Laporan Keuangan Pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL) 3) Neraca 4) Laporan Operasional (LO) 5) Laporan Arus Kas (LAK) 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Metode pengukuran pada penelitian ini melihat pada data nilai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah serta Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas menyajikan pos-pos : ekuitas awal, surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, serta ekuitas akhir.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pos-pos sebagai berikut :

a) Pendapatan-LRA

Merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/
Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal, Lain-lain PAD yang sah.
- Pendapatan transfer pemerintah pusat
- Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain berupa : Pendapatan hibah, Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(b) Belanja

Merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri atas :

- Belanja Pegawai, yang terdiri atas : gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH, Biaya pemungutan pajak, Insentif pemungutan retribusi daerah, Honorarium PNS non PNS dan lembur, Honorarium pengelolaan dana BOS, Belanja pegawai BLUD.
- Belanja Barang dan Jasa, yang terdiri atas : Belanja barang habis pakai, Belanja bahan/ material, Belanja jasa kantor, Belanja premi

asuransi, Belanja perawatan kendaraan bermotor, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja sewa rumah/ gedung/ gudang/ parker, Belanja sewa sarana mobilitas, Belanja sewa alat berat, Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, Belanja makan dan minum, Belanja pakaian dinas dan atributnya, Belanja pakaian kerja, Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Belanja perjalanan dinas, Belanja pemeliharaan, Belanja jasa konsultasi, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, Honorarium PNS, Honorarium non PNS, Belanja Honorarium non pegawai, Belanja jasa nara sumber/ tenaga ahli/ peneliti, Belanja barang dan jasa BLUD, Belanja beasiswa pendidikan non aparatur, Belanja barang dana BOS.

- Belanja Modal, yang terdiri atas : Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan, Belanja asset tetap lainnya.
- Belanja lainnya, yang terdiri atas : Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja tidak terduga, Belanja bagi hasil, Belanja bantuan keuangan.

Untuk akun belanja yang pada penelitian ini melihat pada nilai realisasi semua belanja kecuali pada belanja pegawai. Hal ini karena mengacu pada metode VAIC yang dikembangkan oleh Pulic (1998) yang memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai

(*value creating entity*). Peran aktifnya dalam proses *value creation* yang dipresentasikan dengan *labour expenses* tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen IN. Belanja pegawai dimaksud terdiri seperti : gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH, Biaya pemungutan pajak, Insentif pemungutan retribusi daerah, Honorarium PNS non PNS dan lembur, Honorarium pengelolaan dana BOS, Belanja pegawai BLUD. Sedangkan untuk Belanja-belanja pegawai yang berada di bawah akun Belanja Barang dan Jasa tetap disertakan di dalam penelitian ini seperti : Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS, Honorarium PNS, Honorarium non PNS, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli/ peneliti, serta Belanja beasiswa pendidikan non aparatur.

(c) Transfer

Merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

(d) Pembiayaan (*financing*)

Merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.6 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah saat ini diperlukan sebagai upaya untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga informasi yang dihasilkan menjadi relevan, akurat dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Saat ini, pemerintah daerah di Indonesia bisa dikatakan hampir semuanya telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah Daerah dalam penggunaan aplikasi apapun yang dapat mensupport penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas untuk kemudian dilakukan audit oleh BPK RI. Beberapa aplikasi yang digunakan diantaranya SIMDA, SIKPD maupun system lainnya baik yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun aplikasi yang diciptakan sendiri oleh daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Rosanti *et al*, 2020; Aulia, Susetyo and Raharjo, 2019; Armel, Nasir and Safitri, 2017; Sudarningsih, 2018; Haza, 2015 menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.6.2 Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

A. *Value Added Human Capital* (VAHU)

VAHU menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan sumber daya manusia dari kemampuannya dalam mengaplikasikan keterampilan dan keahlian mereka. Modal sumber daya manusia adalah gabungan kapabilitas sumber daya manusia di suatu organisasi untuk memecahkan permasalahan bisnis. Modal sumber daya manusia bersifat melekat pada diri manusia dan tidak bisa dikatakan menjadi milik organisasi. Yang berarti modal sumber daya manusia bisa turut pergi meninggalkan organisasi ketika orang-orangnya pergi. Modal manusia juga meliputi seberapa efektif suatu organisasi menggunakan sumber daya manusianya sebagai ukuran seperti contohnya kreativitas dan inovasi.

Pandangan teori *stakeholder*, bahwa perusahaan memiliki *stakeholders*, tidak hanya *shareholder* (Belkaoui, 2003). Kelompok-kelompok *stakeholder* meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Teori ini memelihara

hubungan stakeholder yang mencakup semua bentuk hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan *stakeholder theory* dengan *value added human capital* dapat mengindikasikan bagaimana kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan nilai yang baik bagi perusahaan dari dana yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Heryustitriaputri & Suzan (2019), dan Amalia & Rahardian (2019) mengemukakan bahwa *human capital* dengan proksi VAHU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

B. *Structural Capital Value Added (STVA)*

Structural capital atau modal struktural adalah infrastruktur pendukung, proses, dan basis data organisasi yang memungkinkan sumber daya manusia menjalankan fungsinya. Modal struktural juga meliputi perihal seperti gedung, perangkat keras, perangkat lunak, proses, paten, dan hak cipta. Tidak hanya itu, modal struktural juga meliputi perihal seperti citra organisasi, sistem informasi, dan hak milik basis data. Karena keberagamannya ini, maka modal struktural bisa diklasifikasikan lebih jauh lagi menjadi modal inovasi, proses, dan organisasi.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa seluruh aktivitas perusahaan bermuara pada penciptaan nilai atau *value creation* serta

pemanfaatan sumber daya intelektual memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing dan meningkatkan nilai tambah (Ulum *et al.*, 2008). Seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi stakeholder (contohnya melalui sponsorship, inisiatif pengamanan, dan lain-lain) bahkan ketika *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika stakeholder tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Watts & Zimmerman, 1986). *Structural Capital Value Added* (STVA) mengukur jumlah *Structural Capital* (SC) yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari nilai tambah dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan modal struktural dalam menciptakan nilai bagi perusahaan. Kombinasi dari structural capital berupa kepemilikan gedung, perangkat keras, perangkat lunak, proses, paten, hak cipta, citra organisasi, sistem informasi, serta hak milik basis data dengan sumber daya manusia di pemerintah provinsi akan menghasilkan nilai keuangan bagi pemerintah provinsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barokah & Wilopo (2018), Mohammad & Bujang (2019), *Structural Capital Value Added* (STVA) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetio (2015) dan Devi *et al.* (2017), dengan hasil

penelitian yang menunjukkan bahwa *Structural Capital Value Added* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

C. *Value Added Capital Employed (VACA)*

Konsensus yang berkembang dalam konteks teori *stakeholder* adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemegang saham (*shareholder*), sementara *value added* adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh *stakeholders* dan kemudian didistribusikan kepada *stakeholders* yang sama (Meek & Gray, 1988). *Value added* yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan *return* yang dianggap sebagai ukuran bagi *shareholder*. Sehingga dengan demikian keduanya (*value added* dan *return*) dapat menjelaskan kekuatan teori *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi.

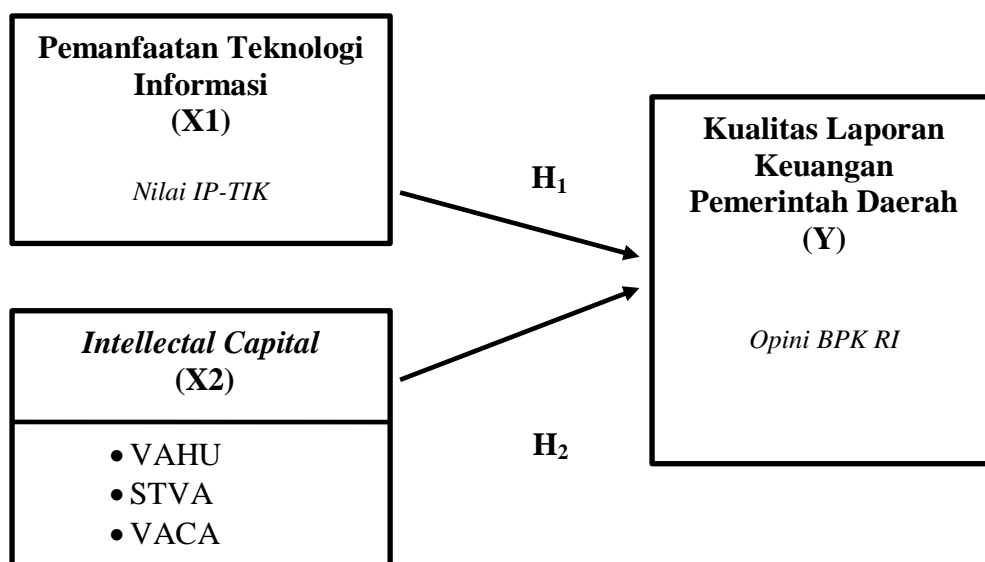
Value Added Capital Employed (VACA) menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari modal fisik yang bekerja terhadap *value added* organisasi. Kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan inovasi pada modal fisik yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan kekayaan bagi perusahaan akan mempengaruhi pengelolaan biaya agar proses produksi dan operasi berjalan dengan efisien. Perusahaan dengan proses operasi yang efisien akan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan dan bagi pelanggan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad & Bujang (2019), Heryustitriputri & Suzan (2019) yang meneliti mengenai Analisis *Intellectual Capital* dengan Metode VAICTM terhadap Kinerja Keuangan dengan hasil secara simultan *value added capital employed* (VACA), berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya terhadap tiga indikator komponen *intellectual capital* yaitu *Value Added Human Capital* (VAHU), *Structural Capital Value Added* (STVA) dan *Value Added Capital Employed* (VACA) diperoleh hasil bahwa ketiganya berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan

H₂ : *Intellectual Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.7 Kerangka Penelitian



Gambar 2. Kerangka Penelitian

2.8 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 3.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Haza, 2015	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2.	Kiranayanti, 2016	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	SDM, SPI, Pemahaman Basis Akrua	SDM, SPI, Pemahaman Basis Akrua mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3.	Efendi, 2017	Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.
4	Sudarningsih, 2018	Kualitas Nilai Laporan Keuangan	Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Nilai Laporan Keuangan.
5	Aulia <i>et al.</i> , 2019	Kualitas	Kompetensi SDM, SPIP, Pemahaman Basis Akrua, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi SDM, SPIP, Pemahaman Basis Akrua, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Nabila <i>et al.</i> , 2019	Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

7	Putra <i>et al.</i> , 2021	Kualitas Laporan Keuangan	Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Informasi	Teknologi Informasi, SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan .
8	Kusnadi <i>et al.</i> , 2022	Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Aparatur Pemerintah, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal	Kompetensi aparatur pemerintah, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber : data diolah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori empiris. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti mengenai ada tidaknya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan *intellectual capital* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia yang dilihat melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 4 (empat) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2017-2020. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang akan digunakan sebagai penentuan sampel adalah :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi di Indonesia
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah telah diaudit oleh BPK RI selama tahun 2017-2020.

Pemilihan sampel terhadap pemerintah provinsi berdasarkan beberapa alasan diantaranya :

1. Anggaran pada pemerintah provinsi yang lebih besar daripada pemerintah kabupaten/ kota sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah provinsi memiliki beban urusan pemerintahan yang lebih besar dari pemerintah kabupaten/ kota yang di dalamnya meliputi cakupan luas wilayah dan jumlah penduduk yang masuk dalam urusan pemerintahan konkuren.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bersifat atributif yang melekat pada jabatan gubernur di 34 provinsi di Indonesia. Gubernur merupakan perpanjangan tangan presiden, bertindak selaku wakil presiden di provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di bidang keuangan diantaranya adalah :

- a) Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b) Penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitas daerah kabupaten/kota;
- c) Penyiapan pelaksanaan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya;
- d) Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah.

3. Perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang hanya dilakukan oleh Provinsi di Indonesia.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

1. Mengutip data anggaran pendapatan belanja daerah seluruh pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi sampel yang sumbernya bersumber dari BPK-RI.
2. Melihat informasi keuangan pemerintah daerah melalui Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi melalui website Badan Pusat Statistik yaitu www.bps.go.id
3. Buku-buku literatur, jurnal ekonomi, dan jurnal ilmu sosial yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Di Indonesia kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan dalam bentuk opini hasil audit BPK RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah memenuhi karakteristik andal yang berarti informasi yang disajikan dapat diverifikasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengukuran variabel kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini dengan cara pemberian skor terhadap perolehan opini BPK RI terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Perhitungan skor diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Skor	Kriteria
1	Jika LKPD mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
0	Jika LKPD mendapat opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3.4.2 Variabel Independen

3.4.2.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Definisi pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson *et al.* (1991) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah.

Pembangunan TIK menggunakan data Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu ukuran standar pembangunan TIK dalam suatu wilayah dengan menggunakan tiga indikator yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan dan keahlian (BPS, 2021). Informasi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) pada informasi di atas yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Data dapat diperoleh dari BPS pada tahun 2017-2020.

Pemanfaatan teknologi informasi = Skor Pemeringkatan IP TIK

3.4.2.2 *Intellectual Capital*

Secara formal VAIC adalah gabungan dari tiga indikator yang terdiri dari: (1) *Value Added Capital Coefficient* (VACA) – indikator dari efisiensi nilai lebih *capital employed*; (2) *Value Added Human Capital* (VAHU) – indikator dari efisiensi nilai lebih *human capital*; dan (3) *Structural Capital Value Added* (STVA) – indikator dari efisiensi nilai lebih dari *structural capital*. Kombinasi dari ketiga value added tersebut akan membentuk VAIC. Cara untuk menghitung VAIC dalam sebuah organisasi pertama-tama menghitung ketiga indikator tersebut diatas. Kombinasi dari ketiga indikator tersebut akan membentuk VAIC.

1. **VACA** (*Value Added Capital Employed*) yaitu rasio dari VA terhadap CA. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit CA terhadap VA organisasi.

$$VACA = \frac{VA}{CA}$$

Ket:

VA (*Value Added*) = Total pendapatan – Biaya-biaya (kecuali biaya pegawai)

CA (*Capital Employed*) = Dana yang tersedia (laba bersih , ekuitas)

2. **VAHU** (*Value Added Human Capital*) yaitu rasio antara VA terhadap HC. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap *value added* organisasi.

$$VAHU = \frac{VA}{HU}$$

Ket:

VA (Value Added) = Total pendapatan - Biaya-biaya (kecuali biaya pegawai)

HU (Human Capital) = Biaya Pegawai

3. **STVA (Structural Capital Value Added)** yaitu rasio dari SC terhadap VA. Rasio ini menunjukkan jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana SC dalam penciptaan nilai.

$$STVA = \frac{SC}{VA}$$

Ket:

SC (Structural Capital) = VA - HC

VA (Value Added) = Total pendapatan - Biaya-biaya (kecuali biaya pegawai)

Berdasarkan rumus diatas, maka formula untuk menghitung VAIC adalah:

$$VAIC = VACA + VAHU + STVA$$

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu pengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian, mentabulasi data berdasarkan dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, serta melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, menurut Sugiyono (2017).

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik (logistic regression) dengan bantuan pengolahan data Software SPSS (*Statistical*

Package For Social Science) versi 20. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh dari analisis dan pengujian tersebut dapat memberikan jawaban yang akurat mengenai variabel yang diteliti.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistik deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini ialah nilai rata-rata (mean), nilai maximum, minimum, dan standar deviasi untuk menggambarkan variabel *intellectual capital*, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pada pemerintah provinsi di Indonesia.

3.5.2 Uji Regresi Logistik

Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Menurut Sugiyono (2017) analisis regresi logistik (*logistic regression*) merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji asumsi klasik pada variabel independennya.

Analisis regresi logistik memiliki empat pengujian diantaranya yaitu : 1) Menilai keseluruhan model (*Overall Model Fit*), 2) Menguji kelayakan model

regresi (*Goodness of Fit Test*), 3) Koefisien determinasi (*Nagelkerke's R Square*), 4) Matriks klasifikasi (Sugiyono, 2017). Penjelasan mengenai keempat pengujian model sebagai berikut:

3.5.2.1 Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Overall model fit digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi Likelihood. Likelihood L merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input (Ghozali, 2018). Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi $-2\log$ likelihood.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai $-2LL$ awal dengan $-2LL$ pada langkah berikutnya. Jika nilai $-2LL$ block number = 0 lebih besar dari nilai $-2LL$ block number = 1. Maka penurunan ($-2\log L$) menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik (Ghozali, 2018).

3.5.2.2 Uji Kelayakan Model Regresi

Uji kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer dan Lemeshow's* yang diukur dengan nilai *chi square*. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa apakah data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit) (Ghozali, 2018). Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) ≤ 0.05 (nilai signifikansi) artinya model tidak sesuai dengan nilai observasinya. Sehingga *Goodness of Fit Test* tidak bisa memprediksi nilai observasinya.

2. Jika nilai probabilitas (P-Value) ≥ 0.05 (nilai signifikansi) artinya model sesuai dengan nilai observasinya. Sehingga *Goodness of Fit Test* bisa memprediksi nilai observasinya.

3.5.2.3 Uji Korelasi

Analisis koefisien korelasi yaitu suatu analisis untuk menilai derajat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi pearson product moment untuk menguji hubungan antara dua variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional (berhubungan bukan berarti disebabkan). Keeratan hubungan uji korelasi ini dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Dalam penelitian ini menggunakan *Korelasi Pearson* karena memenuhi asumsi parametrik. Nilai r akan dikonsultasikan berdasarkan tabel interpretasi, tabel interpretasi tersebut adalah :

Tabel 4.
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 - 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2017).

3.5.2.4 Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square)

Koefisien determinasi pada regresi logistik dilihat dari *Nagelkerke R Square*, karena nilai *Nagelkerke R Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R*

Square pada multiple regression. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari *koefisien cox and snell* untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai *Nagelkerke R Square* mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai *Nagelkarke R Square* mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mampu untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabilitas variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.5.2.5 Matriks Klasifikasi (Classification Matrix)

Matriks klasifikasi digunakan untuk menjelaskan kekuatan dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan kesulitan keuangan yang terjadi di perusahaan. Dalam tabel 2 x 2 terhitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan yang salah (*incorrect*). Tabel klasifikasi tersebut menghasilkan ketepatan secara keseluruhan (Ghozali, 2018).

3.5.3 Model Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian ini akan diuji dengan analisis regresi logistik. Hal ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yaitu pengaruh antara dua variabel independen atau lebih terhadap variabel independen. Model *Regresi Binary Logistic* merupakan model regresi dengan variabel dependen yang merupakan variabel dummy yang tujuannya untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa atau event.

$$\text{Ln} \left(\frac{p}{1-p} \right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Ln = Logaritma Natural

P = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1-P

β_0 = Konstanta

β_{1-2} = Koefisien Regresi

X_1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_2 = *Intellectual Capital*

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Wald (t)

Menurut Ghozali (2018), uji wald (t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui nilai uji wald (uji t), tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika p-value > 0.05 artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika p-value < 0.05 artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Omnibus Tests of Model Coefficients (Uji F)

Omnibus tests of model *coefficients* merupakan uji statistik secara simultan (uji f). Dalam penelitian ini akan menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun tingkat signifikansinya sebesar 5%, sehingga kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika P-Value < 0.05 artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

2. Jika P-Value > 0.05 artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengolahan datad an pembahasan baik secara statistik maupun komprehensif berdasarkan fakta empiris dan kajian teori maupun peraturan terkait dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi : penggunaan perangkat komputer, ketersediaan jaringan internet, dan penggunaan *software*. Diharapkan dengan pemanfaatan ketiga komponen tersebut secara baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi syarat diantaranya andal, tepat waktu serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga akan mendapat opini WTP oleh BPK.
2. *Value Added Capital Coefficient* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari modal fisik yang bekerja terhadap *value added* organisasi. Yang berarti pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dapat menciptakan efisiensi *value added* untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

3. *Value Added Human Capital* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa *Value Added Human Capital* (VAHU) dapat memberikan nilai tambah yang dihasilkan sumber daya manusia dari kemampuannya dalam mengaplikasikan keterampilan dan keahlian mereka.
4. *Structural Capital Value Added* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan *structural capital* atau modal struktural merupakan infrastruktur pendukung, proses, dan basis data organisasi yang memungkinkan sumber daya manusia menjalankan fungsinya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti lazimnya penelitian empiris lainnya, diantaranya adalah :

1. Metode pengukuran variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menggunakan variabel *dummy* berdasarkan opini audit BPK dimana hasilnya menjadi kurang maksimal.
2. Literasi untuk variabel *intellectual capital* di pemerintah daerah masih sedikit sehingga nilai dari *intellectual capital* menjadi kurang maksimal.
3. Pada penelitian ini belanja pegawai yang berada pada akun belanja barang dan jasa (bukan pada akun Belanja Pegawai) seperti : Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; Belanja Kursus, Pelatihan; Belanja Narasumber tenaga ahli serta Belanja Beasiswa Pendidikan non aparatur tetap disertakan dalam pengambilan nilai.

5.3 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang ditemukan, untuk penelitian selanjutnya peneliti memberikan saran-saran berikut :

1. Memperbanyak literasi melalui artikel terindeks sehingga dapat lebih menentukan alat ukur terhadap variabel di pemda.
2. Mencari literasi *intellectual capital* di pemerintah daerah menjadi lebih banyak lagi baik dari jurnal nasional maupun internasional serta memperluas populasi ke kabupaten/ kota untuk melihat hal yang sama pada pemerintah kabupaten/ kota.
3. Pada penelitian selanjutnya hendaknya meniadakan semua belanja pegawai baik yang berada pada akun Belanja Pegawai ataupun pada akun Belanja Barang dan Jasa agar *value creation* yang dihasilkan benar-bener dapat direpresentasikan.

5.4 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait terutama bagi Pemerintah Provinsi di Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menyajikan informasi laporan keuangan secara *real times* supaya informasi laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan melalui sistem yang terintegrasi di daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memudahkan pihak pengelola keuangan pemerintah provinsi, khususnya bagian akuntansi dalam membuat laporan yang berkualitas.

3. Meningkatkan kebijakan untuk mendukung *intellectual capital* (*human capital, relational capital* dan *structural capital*) baik berupa dukungan anggaran maupun peraturan terkait untuk dapat meningkatkan hasil yang optimal dalam peningkatan kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- \N Guthrie, \Njames (2001) 'The Management, Measurement And The Reporting Of Intellectual Capital', *Journal Of Intellectual Capital*, 2(1), Pp. 27–41.
- A, B. (1997) *Intellectual Capital*. International Thomson Business Press, 1997.
- Adiputra, I. M. P., Utama, S. And Rossieta, H. (2018) 'Transparency Of Local Government In Indonesia', *Asian Journal Of Accounting Research*, 3(1), Pp. 123–138. Doi: 10.1108/AJAR-07-2018-0019.
- Ahmed Riahi-Belkaoui (2000) *Accounting Theory. Fourth Edition, By Thomson Learning. London*.
- Alimuddin, Novitasari, Eni., Ichsan, Hisyam., Pradipta, Iqra, A.(2017) 'Intellectual Capital As A Financial Performance Measurement In Public Sector', 40(Icame), Pp. 109–122. Doi: 10.2991/Icame-17.2017.9.
- Armel, R., Nasir, A. And Safitri, D. (2017) 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), Pp. 105–119.
- Aulia, A., Susetyo, B. And Raharjo, T. B. (2019) 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis Akruar, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas (Studi Kasus Pada OPD Kabupaten Tegal)', *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(2), Pp. 173–186. Doi: 10.24905/Permana.V11i2.43.
- Azlan, M., Herwanti, T. And Pituringsih, E. (2015) 'Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), Pp. 188–198.
- Bontis, N., Dragonetti, NC., Jacobsen, K., and Ross, G. 1999. "The Knowledge Toolbox: A Review of The Tools Available to Measures and Manage Intangible Resources". *European Management Journal*. Vol. 17, No. 4, pp. 391-402.
- Bounfour, A., Valle, M. La And Valle, M. La (2005) 'The IC-Dval Approach'. Doi: 10.1108/14691930310487833.
- Cabrita, Rosario do Maria., Bontis, N. 2008. *Int. J. Technology Management*, Vol. 43, Nos. 1-3, 2008
- Del Bello, A. (2006) 'Intangibles And Sustainability In Local Government Reports: An Analysis Into An Uneasy Relationship', *Journal Of*

- Intellectual Capital*, 7(4), Pp. 440–456. Doi: 10.1108/14691930610709103.
- Castro, M. De (2011) ‘Technologia, 216 Hills Road, Cambridge, CB2 8PQ, UK’, P. 28223.
- Cohen, S. And Vlismas, O. (2013) *Analysing The Relationship Between Intellectual Capital And Performance In Local Governments, Global Business And Economics Review*.
- Cordella, A. (2006) ‘Transaction Costs And Information Systems: Does IT Add Up?’, *Journal Of Information Technology*, 21(3), Pp. 195–202. Doi: 10.1057/Palgrave.Jit.2000066.
- Deegan, C. (2004) ‘Environmental Disclosures And Share Prices — A Discussion About Efforts To Study This Relationship’, 28, Pp. 87–97. Doi: 10.1016/J.Accfor.2004.04.007.
- Dewi, A. Sudrajat and Suhendro, S. (2021) ‘IT In The Public Sector : A Road For Development Services , A Bibliographical Study’, 21(22), Pp. 16–28. Doi: 10.9734/AJEBA/2021/V21i2230521.
- García, A. C. And García-García, J. (2010) ‘Determinants Of Online Reporting Of Accounting Information By Spanish Local Government Authorities’, *Local Government Studies*, 36(5), Pp. 679–695. Doi: 10.1080/03003930.2010.506980.
- Gardner, D. M. *Et Al.* (2000) ‘A Contingency Approach To Marketing High Technology Products’, *European Journal Of Marketing*, 34(9/10), Pp. 1053–1077. Doi: 10.1108/03090560010342476.
- Ghoshal, Sumantra dan Wenpin Tsai, “Social Capital and Value Creation: the Role of Intrafirm Networks”, 1998, *Academy of Management Journal*, Vol. 41. No. 4, 464-476.
- Ghozali, I. (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governmental Accounting Standard Board (GASB). *Full Accrual Revenue Recognition for Governmental Fund Types*. FM 01-01: GASB Statement No.34 and 35.
- Haliah, H. And Nirwana, N. (2019) ‘The Development Of Good Governance Model For Performance Improvement’, *International Journal Of Excellence In Government*, 1(1), Pp. 21–36. Doi: 10.1108/Ijeg-09-2018-0004.
- Hamzah, A. (2009) ‘Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas Dan Kondisi Yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Di Kabupaten Madura). Simposium Nasional Sistem Teknologi In’.
- Hashim, M. J., Osman, I. And Alhabshi, S. M. (2015) ‘Effect Of Intellectual Capital On Organizational Performance’, *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 211(September), Pp. 207–214. Doi: 10.1016/J.Sbspro.2015.11.085.
- Haza, I. I. (2015) ‘Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi

- Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang)’, *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3(1), Pp. 1–19.
- Herindraningrum, F. F. And Yuhertiana, I. (2021) ‘Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review’, *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), Pp. 157–171. Doi: 10.18860/Em.V12i2.12287.
- Hidayat, Noor AA. Sri Mulyani : Banyak Daerah Dapat WTP Tapi Korupsi Tetap Jalan. 2018. <https://bisnis.tempo.co/read/1128287/sri-mulyani-banyak-daerah-dapat-wtp-tapi-korupsi-tetap-jalan>.
- Indriasari, Desi (2008). ”Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Kumpulan Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak 2008.
- Indriasih, D. (2014) ‘The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting In Local Government’, *Research Journal Of Finance And Accounting*, 5(20), Pp. 38–47.
- International Accounting Standard Board (IASB). 2000. IPSAS 7 – Accounting for Investments in Associates. London: IASB Publishing Department
- International Federation of Accountants (IFAC). 2000. IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board. Public Sector Committee. New York.
- International Federation of Accountants (IFAC). 2003. Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition). Public Sector Committee Study 14. New York.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD).
- Jensen, M. C. And Meckling, W. H. (1976) ‘Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure Related Papers’, *Journal Of Financial Economics*, 3(4), Pp. 305–360. Available At: [Http://Hupress.Harvard.Edu/Catalog/JENTHF.Html%0aalso](http://Hupress.Harvard.Edu/Catalog/JENTHF.Html%0aalso).
- Kaufmann, L. And Schneider, Y. (2002) ‘A Synthesis Of Current Research’. Doi: 10.1108/14691930410550354.
- Knox, C. And Janenova, S. (2019) ‘The E-Government Paradox In Post-Soviet Countries’, *International Journal Of Public Sector Management*, 32(6), Pp. 600–615. Doi: 10.1108/IJPSM-08-2018-0173.
- Kusnadi, A., Oemar, F., Supeno, B. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1, Maret 2022, 51-63.
- Kusumawardhani, F. And Muanas, M. (2020) ‘Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), Pp. 137–146. Doi: 10.37641/Jiakes.V8i2.372.
- Laudon, Kenneth C And Laudon, J. . (2000) *Organization And Technology In The Networked Enterprise*. Six Editio. Management Information System.
- Laudon, Kenneth C. & Jane Price (2004). *Management Information Systems: Managing The Digital Firm*, 10th Edition. Pearson Education, Inc., New

Jersey

- Loli Efendi, Darwanis, S. A. (2017) 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), Pp. 182–195.
- Mardiasmo. (2006) *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. 2 (1). Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
- Masdiantini, P. R. And Erawati, N. Made A. (2016) 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan', *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), Pp. 1150–1182.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M. And Anriva, D. H. (2020) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), Pp. 69–78. Doi: 10.37859/Jae.V10i1.1975.
- Mayo, A. (2000) *The Role Of Employee Development In The Growth Of Intellectual Capital*. Personal Review.
- McKeown, A. (2001) *Chinese Migrant Networks And Cultural Change : Peru, Chicago And Hawaii 1900-1936*. University Of Chicago Press, 2001.
- McEkwe. 2013. *The Relationship Between Intellectual Capital And Growth In Revenue of Deposit Money Banks In Nigeria*. Research Journal of Finance and Accounting 4 (12), 55-64.
- Megasiwi, I. A. And Adi, P. H. (2020) 'Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(1), Pp. 33–49. Doi: 10.30813/Jab.V13i1.1898.
- Nabila, Zubaidi., Cahyono, Dwi. dan Maharani, A. (2019) 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan', *International Journal of Social Science and Business*, Vol 3, No. 2, PP 68-76.
- Nazir, M. (2005) *Metodologi Penelitian (Research Methodology)*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Nilamsari, Y. *Et Al.* (2021) 'Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota Semarang', *MAKSIMUM: Media ...*, 10(2), Pp. 85–94. Available At: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/view/6737>.
- OECD. 1999. "*OECD Symposium on Measuring and Reporting of Intellectual Capital, Amsterdam*", Organisation for Economic Cooperation and development, Paris.
- Onge Saint, H. dan Armstrong, C. 1998. *The Conductive Organization: Building Beyond Sustainability*. London. Elsevier ButterworthHeinemann
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Pulic, A. (2000). “VAICTM – an accounting tool for IC Management”, *International Journal of Technology Management*, 20 (5-8), 702-714.
- Putra, E, W., Kusuma, L, I., Dewi, W, M., 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi', *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers*, ISSN Online : 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306.
- Roos, G And Dragonetti, N, C. (1998) *La Evaluacion De Ausindustry Y El Business Network Programmme : Una Perspectiva Desde El Capital Intellectual*. *Boletin De Estudios Economicos*, 53, P. 265.
- Rosanti, N. *Et Al.* (2020) ‘Dampak Contract Farming Terhadap Kinerja Usahatani Kopi Di Lampung’, *Agriekonomika*, 9(2), Pp. 140–149. Doi: 10.21107/Agriekonomika.V9i2.8789.
- Santoso, S. (2010) *Statistik Parametrix*. Elex Media Komputindo, 2010.
- Sawarjuwono, T. (2003) ‘Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research)’, *Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research)*, 5(1), Pp. 35–57. Doi: 10.9744/Jak.5.1.Pp.35-57.
- Schneider, A. And Samkin, G. (2008) ‘Intellectual Capital Reporting By The New Zealand Local Government Sector’, *Journal Of Intellectual Capital*, 9(3), Pp. 456–486. Doi: 10.1108/14691930810892036.
- Schneider, S. (2008) ‘Copyright Statement : Intellectual Capital Reporting By The New Zealand Local Government Sector The University Of Waikato’, 1994, P. 232. Available At: [Http://Waikato.Researchgateway.Ac.Nz/%0aresearch](http://Waikato.Researchgateway.Ac.Nz/%0aresearch).
- Serrano Cinca, C., Mar Molinero, C. And Bossi Queiroz, A. (2003) ‘The Measurement Of Intangible Assets In Public Sector Using Scaling Techniques’, *Journal Of Intellectual Capital*, 4(2), Pp. 249–275. Doi: 10.1108/14691930310472857.
- Stewart, T. A. (1997) *"Intellectual Capital: The New Wealth Of Organizations"*. Currency Doubleday, New York, NY.
- Styles, A. K. And Tennyson, M. (2007) ‘Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management Article Information’, *Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), Pp. 56–92. Available At: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003>.
- Sudarningsih, C. (2018) ‘Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Nilai Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng’, *Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha*, 1.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suhendro, S. Syaipudin, U and Metalia. (2021) 'Peran Tipe Informasi Modal

- Intelektual sebagai Variabel Moderasi pada Hubungan Modal Intelektual dan Nilai Perusahaan'. ISSN : 2339-0859 (online). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, Vol. 8 No. 2 hal 133-150. Doi: <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v8i2.10175>.
- Sveiby, K. E. (1997) *The New Organizational Wealth : Managing & Measuring Knowledge-Based Asset*. Berret-Koehler Publisher, 1997.
- Tan, H.P., D. Plowman and P. Hancock. 2007. Intellectual Capital and Financial Returns of Companies. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 8 No. 1, 76-9
- Thompson, Ronald L., Higgins, Christopher A-, dan Howell, Jane M., (1991), "Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization", *L{IS Quarterly*, March, pp.i25-i43
- Ulum (2009) *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisa*.
- UNDP. 1997. Governance For Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. Accessed On: 07 March 2010. Available At: <Http://Www.Pogar.Org/Publications/Other/Undp/Governance/Undppolicydoc97-E.Pdf>.
- Virgasari, Aviva (2009). Hubungan Antara Opini Auditor Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Kinerja Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Wardani (2017) 'Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten'.
- Watts, R.L. And Zimmerman, J. L. (1986) 'Positive Accounting Theory.'
- Yapa, P. W. S. And Guah, M. W. (2012) 'Public-Sector Accounting And E-Governance In Developing Countries: Case Of Sri Lanka', *Journal Of Asia-Pacific Business*, 13(1), Pp. 37-58. Doi: 10.1080/10599231.2012.630609.